

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah ekonomi yang sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia adalah ketimpangan pendapatan, hal ini terjadinya ketika dalam suatu wilayah maupun negara distribusi pendapatannya tidak merata, maka terdapat banyak masyarakat yang memiliki pendapatan yang berbeda yaitu ada yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan rendah. Jika di masing-masing daerah terjadi ketimpangan pendapatan, tentunya akan bisa menyebabkan masalah, yang dimana diantaranya terjadinya kecemburuan sosial yang berasal dari individu dengan pendapatan rendah kepada individu dengan pendapatan lebih tinggi. Sehingga hal inilah yang bisa membuat suasana yang tidak baik karena merasa kurang adil jika didalam suatu daerah memiliki pendapatan berbeda.

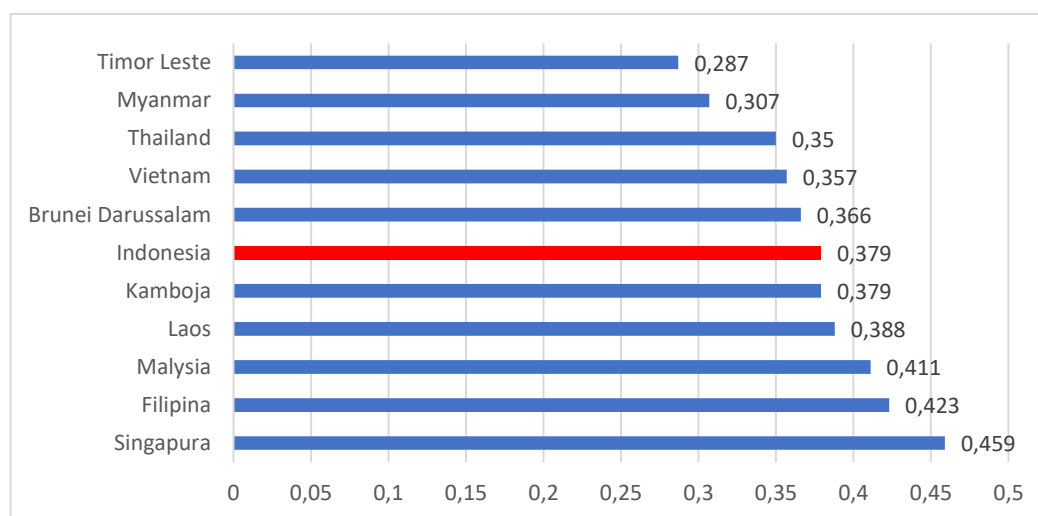
Ketimpangan pendapatan memiliki cakupan dampak yang lebih luas dibandingkan kemiskinan, yang mana kemiskinan hanya menggambarkan kondisi ekonomi kelompok masyarakat tertentu yang berpenghasilan rendah, ketimpangan justru mencerminkan kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ini tidak hanya memperparah kemiskinan, tetapi juga menghambat mobilitas sosial, menurunkan daya beli masyarakat secara umum, serta meningkatkan risiko konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi (Todaro & Smith, 2015).

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan karena dampaknya tidak hanya terbatas pada urusan ekonomi, melainkan juga mengancam keharmonisan hidup bermasyarakat dan kelangsungan pembangunan bangsa (Todaro & Smith, 2006). Kesenjangan yang terlalu besar dapat merusak persatuan masyarakat, memicu perpecahan politik, dan justru menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara tingginya ketimpangan kesempatan akan menghambat pengembangan kemampuan masyarakat dan membatasi mobilitas sosial ekonomi (Stiglitz, 2012).

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan digunakan Indeks Gini atau Gini Rasio (Gini Ratio). Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila

koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Ada 3 (tiga) kategori ketimpangan pendapatan yaitu $G < 0,3$ = ketimpangan rendah; $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang; dan $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi. Indeks Gini dihitung berdasarkan kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan dalam suatu populasi, dimana semakin jauh kurva dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang terbesar didunia juga menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia pada maret 2023 adalah sebesar 0,338 persen dengan rasio gini perdesaan sebesar 0,313 prsen lebih kecil dibanding perkotaan sebesar 0,409 persen. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin dari September 2022 yaitu sebesar 0,381 persen. Angka Gini Rasio dari BPS, Indonesia menempatkan kedalam golongan ketimpangan sedang.



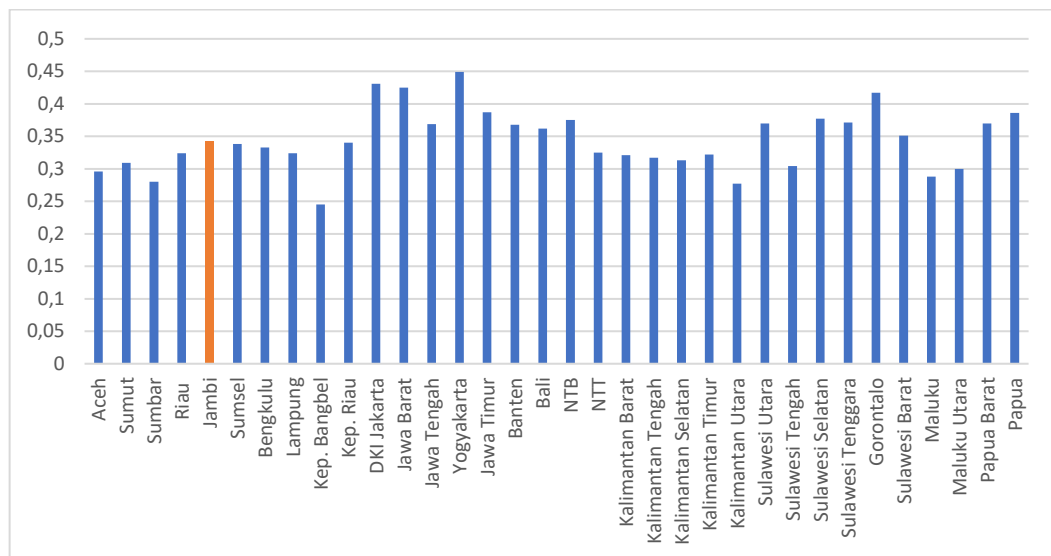
Sumber: World Bank, 2021

Gambar 1.1 Posisi Indeks Gini Rasio Indonesia di ASEAN

Dalam gambar 1.1, Menurut data Gini Rasio versi Bank Dunia, Indonesia menempati posisi keenam tertinggi di Asia Tenggara dalam hal ketimpangan pendapatan. Meskipun ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak seburuk negara-negara dengan ketimpangan sangat tinggi seperti Singapura sebesar 0,459 persen,

namun masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Brunei Darussalam sebesar 0,366 persen, Vietnam sebesar 0,357 persen, Thailand sebesar 0,350 persen, Myanmar sebesar 0,307 persen, dan Timor Leste sebesar 0,287 persen. Berdasarkan data tersebut, ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks dan saling terkait, yang mana ketimpangan menciptakan ancaman terhadap stabilitas sosial karena menimbulkan kecemburuan dan ketegangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, yang dapat memicu konflik sosial dan mengganggu keharmonisan hidup bermasyarakat (Stiglitz, 2012). Distribusi pendapatan yang tidak merata menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena daya beli masyarakat menurun dan konsumsi domestik melemah (IMF, 2015). Ketimpangan memperburuk akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan kualitas sumber daya manusia (OECD, 2015). Kondisi ini diperparah oleh perubahan struktur ekonomi akibat globalisasi dan kemajuan teknologi yang cenderung menguntungkan kelompok yang sudah kaya dan berpengaruh, sehingga menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus dan menghambat upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (UNDP, 2020).

Provinsi Jambi terletak di posisi geografis yang strategis dan berfungsi sebagai jalur penghubung penting dalam wilayah ASEAN serta antarwilayah di Sumatera, terutama dalam pergerakan barang, jasa, dan penduduk. Namun demikian, meski memiliki keunggulan lokasi, pemerataan pendapatan di provinsi ini masih menghadapi ketimpangan. Provinsi ini memiliki 9 kabupaten dan memiliki 2 kota yang dimana telah memiliki masing-masing karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini menciptakan pola pembangunan yang beragam dan mendorong potensi pertumbuhan yang bervariasi di setiap wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.2 Perbandingan Gini Rasio Provinsi di Indonesia

Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan data gini rasio antar Provinsi di Indonesia pada tahun 2023, angka Gini Rasio di Provinsi Jambi yang memiliki Gini Rasio sebesar 0,343 dan menempati urutan 16 tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2023 meskipun tidak setinggi DI Yogyakarta sebesar 0,449 persen atau DKI Jakarta sebesar 0,411 persen, ketimpangan di Jambi tetap lebih tinggi dibanding beberapa provinsi lain seperti NTT sebesar 0,325 persen, Bengkulu sebesar 0,333 persen, dan Lampung sebesar 0,324 persen. Berdasarkan data tersebut, Jambi menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Indonesia, artinya kesenjangan antara penduduk di Jambi masih cukup besar. Meskipun Jambi tidak termasuk provinsi dengan ketimpangan terburuk, namun posisinya yang berada di tingkat menengah-atas menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan agar distribusi pendapatan menjadi lebih adil. Sebagai provinsi yang memiliki wilayah cukup luas dengan 9 kabupaten dan 2 kota, setiap daerah memiliki karakteristik dan pola pembangunan yang berbeda-beda sehingga perlu diteliti secara mendalam faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Dengan memahami penyebab ketimpangan pendapatan di Jambi melalui penelitian yang komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang tepat dan efektif

untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Jambi secara merata (Sen, 1999).

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan sudah banyak dilakukan, diantaranya ada penelitian dari Utami (2020) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi angka beban dan kepadatan penduduk. Penelitian dari Nabila & Laut (2021) Alamanda (2021); Zandi et al. (2022); dan Sugiarti & Erdkhadifa (2023) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka. Penelitian dari Sari et al. (2021); Harafah et al. (2022); Sugiarti & Erdkhadifa (2023); Rahmawati et al. (2024); dan Ashari et al. (2024) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi Pendidikan. Penelitian dari Utami (2020); Sari et al. (2021); Farhan & Sugianto (2022); Harafah et al. (2022); dan Ashari et al. (2024) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi kemiskinan. Penelitian dari Alamanda (2021); Sugiarti & Erdkhadifa (2023); dan Rahmawati et al. (2024) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Alamanda (2021) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi rasio pajak. Penelitian dari Farhan & Sugianto (2022); Walujadi et al. (2022); dan Sugiarti & Erdkhadifa (2023) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi indeks Pembangunan manusia. Penelitian dari Harafah et al. (2022); Walujadi et al. (2022); dan Rahmawati et al. (2024) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi jumlah penduduk. Penelitian dari Zandi et al. (2022) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi korupsi dan inflasi. Penelitian dari Miquel et al. (2022) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi pendapatan pajak. Penelitian dari Walujadi et al. (2022); dan Miquel et al. (2022) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi PDRB. Penelitian dari Walujadi et al. (2022) menemukan ketimpangan pendapatan dipengaruhi belanja pemerintah dan TPAK. Berdasarkan penelitian – penelitian tersebut, diperoleh factor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah angka beban, kepadatan penduduk, kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, Pendidikan, pertumbuhan ekonomi, rasio pajak, indeks Pembangunan manusia, jumlah penduduk, korupsi, inflasi, pendapatan pajak, PDRB, belanja pemerintah dan TPAK.

Penelitian ini menggunakan 4 variable yang akan diteliti, yaitu pertama pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan Kuznets, pada tahap awal pembangunan dapat memperbesar ketimpangan karena manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap modal dan peluang ekonomi. Namun, seiring waktu, jika pertumbuhan disertai pemerataan akses, ketimpangan dapat menurun. Kedua Pendidikan, Pendidikan memainkan peran penting dalam proses ini, karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih baik, sehingga membantu mengurangi kesenjangan pendapatan (Todaro & Smith, 2015). Ketiga kepadatan penduduk, kepadatan penduduk yang tinggi, khususnya di daerah perkotaan, dapat memperbesar ketimpangan jika tidak diimbangi dengan pemerataan fasilitas dan kesempatan kerja, karena dapat menciptakan tekanan pada pasar tenaga kerja dan pelayanan publik. Dan keempat Tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi pengangguran, semakin besar jumlah penduduk yang tidak memiliki pendapatan tetap, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan antara kelompok berpenghasilan dan tidak berpenghasilan (Jhingan, 2016). Oleh karena itu, keempat variabel tersebut sangat relevan dalam memengaruhi dinamika ketimpangan pendapatan. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Kepadatan Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran dan masukan untuk pemerintah Provinsi Jambi dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masalah Ketimpangan pendapatan terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan masyarakat betapa pentingnya mengetahui permasalahan Ketimpangan pendapatan yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat dalam mengetahui permasalahan tentang ketimpangan pendapatan yang ditemui di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.